
Analisis Respon Indonesia Terhadap Konflik Rusia-Ukraina pada Tahun 2022

I Gusti Ngurah Divandra Prema Oktadhio¹⁾, I Made Anom Wiranata²⁾

^{1,2)} Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial, Universitas Udayana.

Abstrak

Pecahnya konflik antara Rusia dan Ukraina menimbulkan beragam respon di kalangan Internasional yang karena oleh dampak yang diakibatkan dari konflik tersebut seperti banyaknya timbul korban jiwa hingga munculnya ancaman ketahanan pangan. Peristiwa ini kemudian mendorong *UN General Assembly* membentuk sidang khusus untuk membahas konflik antara Rusia dan Ukraina tersebut. Kemudian dari siding tersebut diketahui bahwa sebagian besar diantaranya memilih untuk mengecam Rusia karena dianggap sebagai penyebab terjadinya konflik tersebut. Namun masih ada beberapa negara yang memilih untuk bersikap imparisial termasuk Indonesia. Melihat respon Indonesia tersebut, penelitian ini berupaya untuk mengetahui alasan Indonesia dalam memberikan respon imparisial pada konflik Rusia-Ukraina. Penelitian ini menerapkan metode penelitian kualitatif dengan sumber sekunder yang kemudian dianalisis menggunakan konsep *Prudent Judgement Approach* dan *Hedging Strategy*. Dari analisis tersebut kemudian diketahui alasan Indonesia mengambil sikap hati-hati dan imparisial terhadap konflik tersebut dikarenakan adanya kondisi ketidakpastian dan ambiguitas ancaman yang dirasakan oleh Indonesia. Maka dari itu kemudian Indonesia perlu untuk hati-hati guna menganalisis lebih lanjut strategi yang tepat untuk bagi Indonesia untuk dapat menghindari kondisi yang tidak pasti tersebut serta respon imparisial sebagai upaya Indonesia tetap menjalin hubungan yang baik terhadap pihak-pihak yang berkonflik.

Kata-kunci : Hedging Strategy, Konflik Rusia-Ukraina, Prudent Judgement Approach, Respon Indonesia

Abstract

The outbreak of the conflict between Russia and Ukraine gave rise to various responses in international circles due to the impacts resulting from the conflict, such as the large number of casualties and the emergence of threats to food security. This incident then prompted the UN General Assembly forming a special session to discuss the conflict between Russia and Ukraine. Then from the trial it was discovered that the majority of them chose to criticize Russia because they were seen as the cause of the conflict. However, there are still several countries that choose to be impartial, including Indonesia. Looking at Indonesia's response, this research seeks to find out why Indonesia gave a impartial response to the Russia-Ukraine conflict. This research applies qualitative research methods with secondary sources which are then analyzed using the concepts of Prudent Judgment Approach and Hedging Strategy. From this analysis, it is known that the reason why Indonesia took a cautious and impartial response towards this conflict was due to the

conditions of uncertainty and ambiguity of the threat felt by Indonesia. Therefore, Indonesia needs to be careful in further analyzing the right strategy for Indonesia to be able to avoid these uncertain conditions and impartial response as an effort for Indonesia to maintain good relations with the parties in conflict.

Keywords : *Hedging Strategy, Russia-Ukraine Conflict, Prudent Judgment Approach, Indonesia's Response*

Kontak Penulis

I Gusti Ngurah Divandra Prema Oktadhio

Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana

Alamat: Jalan PB Sudirman (Kampus Sudirman) Denpasar, Bali

Telp: +62 (361) 701812 Fax: +62 (361) 701907

E-mail : divandraprema@student.unud.ac.id

PENDAHULUAN

Setelah sebelumnya Ukraina dan Rusia terlibat dalam *proxy war* pada tahun 2014 (Ningtyas Kusuma, et al., 2018), konflik antar kedua negara tersebut kembali terjadi pada awal tahun 2022. Pada Februari 2022, Rusia mengakui wilayah Donetsk dan Luhansk untuk merdeka dari Ukraina (CNBC Indonesia, 2022). Pengakuan ini sendiri dilandasi oleh adanya krisis pada wilayah Donetsk dan Luhansk yang tak juga kunjung selesai. Adanya kelompok separatisme yang berusaha melepaskan diri dari Ukraina dimanfaatkan Rusia untuk mendapatkan akses ke wilayah tersebut dengan mendukung wilayah tersebut untuk merdeka. Selanjutnya pada bulan yang sama pasukan Rusia kemudian memasuki wilayah Donetsk dan Luhansk. Rusia mengklaim bahwa pasukan tersebut diperuntukan sebagai pasukan perdamaian setelah mengakui wilayah tersebut sebagai wilayah merdeka (CNBC Indonesia, 2022). Dari sinilah kemudian hubungan antara Rusia dan Ukraina kembali memanas.

Panasnya hubungan antara Rusia dan Ukraina mengarahkan kedua negara tersebut pada konflik. Invasi yang dilakukan oleh Rusia ke dalam yurisdiksi Ukraina menyebabkan konflik senjata tidak dapat dihindari. Akibatnya, banyak masyarakat yang harus menderita khususnya mereka yang berada pada lokasi konflik. Dikutip melalui *The Office of the UN High Commissioner for Human Rights* (OHCHR) per 7 Mei 2023, sebanyak 23.606 warga sipil menjadi korban akibat dari konflik tersebut (OHCHR, 2023). Jumlah tersebut termasuk sebanyak 8.791 orang meninggal dan 14.815 terluka (OHCHR, 2023).

Merujuk pada data yang diterbitkan oleh *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) per 4 April 2023, sebanyak 20.189.825 orang telah meninggalkan Ukraina (UNHCR, 2023). Data lain yang diterbitkan UNHCR menyebutkan bahwasannya sebanyak 8.163.268

diantaranya tercatat mengungsi di seluruh Eropa (UNHCR, 2023). Ukraina sendiri pada akhir tahun 2021 memiliki jumlah populasi sekitar 43.5 juta orang (World Population View, 2023). Artinya, lebih dari setengah jumlah populasi Ukraina masih terjebak dalam wilayah konflik dan membutuhkan bantuan serta perlindungan kemanusiaan.

Akibat konflik tersebut, publik internasional menaruh perhatian pada aktivitas kedua negara berkonflik tersebut. Berdasarkan prinsip, dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), invasi yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina jelas bertentangan Piagam PBB terutama Bab I Pasal 2 pada poin nomor 4.

Indonesia menjadi salah satu negara yang memberikan perhatian terhadap interaksi kedua negara tersebut. Uniknya, Indonesia terlihat hati-hati dalam memberikan respon terhadap peristiwa tersebut. Dalam beberapa kesempatan Indonesia terlihat sangat yakin untuk memberikan penekanan pada prinsip dan tujuan PBB serta hukum internasional. Indonesia juga terlihat mengancam dan menuntut agar Rusia menghentikan tindakannya terhadap Ukraina yang jelas melanggar prinsip dan tujuan PBB. Namun, Indonesia belum bisa memutuskan apakah Rusia pantas dihukum atas peristiwa tersebut. Bahkan Indonesia abstain dalam resolusi untuk membekukan Rusia dari keanggotaan *UN Human Right Council* padahal tindakan Rusia tersebut jelas-jelas merunggut hak masyarakat yang menjadi korban dalam konflik tersebut. Kehati-hatian Indonesia ini membuat Indonesia condong ke arah imparsial dan berupaya menahan diri untuk bertindak agresif dalam memberikan responnya terhadap konflik tersebut.

Dalam penelitian ini, dilakukan tinjauan pustaka terhadap beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini diantaranya: Pertama, penelitian karya Grace Frestisa Irena

Hutabarat yang berjudul “Arah Kebijakan Luar Negeri Indonesia Paska Perang Rusia-Ukraina Berdasarkan Perspektif *National Interest*”. Penelitian ini membahas tentang konflik Rusia-Ukraina pada tahun 2022 yang menjadi sorotan dunia akibat dampak negatifnya. Dalam penelitiannya, Grace menemukan bahwasanya Indonesia menjadi salah satu negara yang turut merasakan dampak negatif akibat konflik antara Rusia dan Ukraina. Indonesia kemudian memberikan kebijakan luar negerinya guna menghindari dampak negatif tersebut.

Kedua, penelitian karya Gizem Butun, Yanyan Mochamad Yani, Arry Bainus yang berjudul “*Indonesian Foreign Policy Maintaining In Maritime Security Towards China’s New Silk Road*”. Penelitian ini membahas terkait peranan politik luar negeri Indonesia dalam mengelola proyek *New Silk Road* yang dijalankan oleh China untuk menjaga keamanan maritim Indonesia. Adanya pertimbangan mengenai dampak yang akan dibawa proyek China tersebut memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian mengenai kasus *New Silk Road* dan hubungannya dengan keamanan maritim Indonesia. Terlebih lagi peneliti menemukan adanya faktor internal seperti sentimen anti-Tiongkok serta faktor eksternal seperti persaingan AS-Tiongkok yang dapat mempengaruhi Indonesia dalam mengambil tindakan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teori *foreign policy* dan *maritime security* sebagai dasar untuk memahami dan menerjemahkan peristiwa yang sedang diteliti.

Ketiga, penelitian karya Penelitian ketiga diteliti oleh Faridh Ma'ruf, Tri Legionosuko dan Helda Risman yang berjudul “*The Rationality of Indonesia Free-Active Politics Facing Chinese Aggressiveness in the Claims of the North Natuna Sea*” Penelitian ini menyajikan permasalahan ketegangan pada Laut China Selatan antara Indonesia dan China dalam kasus *Nine-dash Line* yang bersinggungan dengan *ZEE Laut*

Natuna Utara. Ketegangan ini membuat Indonesia khawatir ancaman tentang hak kedaulatannya serta kepentingannya. Terlebih lagi peristiwa ini jelas ditentang dalam prinsip politik luar negeri Indonesia yakni *Bebas Aktif*. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai kebijakan luar negeri Indonesia sebagai penentu posisi serta interaksi politik Indonesia dalam merespon tindakan agresif China. Dalam memberikan analisisnya, peneliti menggunakan teori *Hedging Strategy* dan *Dependency* sebagai pisau analisis untuk mempertajam penelitian.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mendeskripsikan respon yang diberikan Indonesia terhadap konflik Rusia-Ukraina pada Tahun 2022. Sumber data yang digunakan adalah sumber sekunder seperti laporan, jurnal, situs resmi pemerintahan dan lainnya untuk mendalami respon Indonesia terhadap konflik Rusia-Ukraina. Negara merupakan unit analisis dalam penelitian ini dan teknik studi dokumentasi digunakan untuk menyortir kebutuhan analisis respon Indonesia dalam konflik Rusia-Ukraina. Untuk teknik analisis data diterapkan tiga tahap yakni reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pro-Kontra Respon Internasional Atas Konflik Rusia-Ukraina Tahun 2022

Sebagai negara yang tergabung dalam PBB, tentunya setiap negara harus menghormati aturan dan prinsip yang telah disepakati dalam PBB. Namun tindakan yang dilakukan oleh Rusia ini jelas bertentangan dengan Piagam PBB khususnya pada BAB 1 Pasal 2 pada poin 4. Poin tersebut menjelaskan jika setiap anggota PBB diharuskan untuk tidak menggunakan ancaman atau kekerasan terhadap integritas

teritorial atau kemerdekaan politik negara manapun.

Menanggapi invasi yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina, *Security Council* melakukan pertemuan pada tanggal 25 Februari 2022 untuk membahas rancangan resolusi atas tindakan Rusia terhadap Ukraina (*Meeting Coverage Security Council, 2022*)¹. Dalam pertemuan tersebut Albania dan Amerika Serikat mengajukan rancangan resolusi. Namun pada akhirnya *Security Council* menolak rancangan tersebut dikarenakan adanya penentangan dari salah satu anggota tetap *Security Council* yakni Rusia. Rusia percaya bahwa rancangan resolusi tersebut tidak sesuai apa yang diinginkan masyarakat Ukraina.

Usai rancangan Resolusi tersebut gagal, pada 27 Februari 2022, *Security Council* membentuk sidang khusus untuk mengadakan sesi khusus darurat oleh *General Assembly*. Sesi khusus darurat tersebut kemudian menghasilkan 4 resolusi. Resolusi pertama menuntut agar Rusia segera, sepenuhnya dan tanpa syarat mengakhiri operasi militernya di Ukraina serta menarik seluruh pasukan dari yurisdiksi Ukraina (UN News, 2022). Resolusi pertama menghasilkan suara sebanyak 141 negara setuju, 35 negara abstain dan 5 negara menolak resolusi tersebut. Resolusi kedua menuntut akses bantuan dan perlindungan sipil di wilayah konflik serta mengkritik Rusia sebagai penyebab atas terciptanya kondisi ancaman kemanusiaan. Resolusi kedua menghasilkan suara sebanyak 140 negara setuju, 38 negara abstain dan 5 negara menolak. Resolusi ketiga bertujuan untuk

menanggukhkan Rusia dari *UN Human Rights Council* (UNHRC) yang menghasilkan suara sebanyak 93 negara mendukung, 58 Abstain dan 24 negara menolak. Resolusi keempat membahas tentang integritas tutorial ukraina dan mengutuk langkah Rusia untuk menduduki sebagian wilayah Ukraina. Resolusi keempat kemudian menghasilkan 143 negara setuju, 35 negara abstain dan 5 negara menolak.

Jika melihat data hasil resolusi, khususnya resolusi pertama dan keempat, memang sebagian besar negara mendukung resolusi tersebut. Namun masih ada 5 negara yakni Nikaragua, Belarusia, Suriah, Korea Utara dan tentunya Rusia menolak resolusi tersebut serta 35 negara termasuk China, Afrika Selatan, India, dan Pakistan abstain dalam resolusi tersebut. Jadi masih ada beberapa negara yang belum menganggap tindakan Rusia tersebut sepenuhnya salah, bahkan ada negara yang membenarkan tindakan Rusia dengan cara menolak kedua resolusi tersebut.

Negara negara yang mengutuk langkah Rusia atau dengan kata lain Pro-Ukraina khususnya negara-negara Uni Eropa. Uni Eropa sendiri memberikan paket sanksi terhadap hampir 1.800 individu dan entitas yang terdiri dari larangan berpergian dan pembekuan aset (European Council, 2023). Hingga Juni 2023, Uni Eropa telah membekukan aset sebanyak 21,5 miliar Euro, selain itu aset dari Bank Sentral Rusia yang diblokir di negara-negara Uni Eropa dan G7 sendiri mencapai 300 miliar Euro (European Council, 2023). Selain pembekuan aset tersebut, Uni Eropa juga memberlakukan sanksi perdagangan pada Rusia atas produk produk seperti; teknologi mutakhir; jenis mesin dan alat transportasi; barang dan teknologi untuk penyulingan minyak; peralatan industri energi, teknologi dan layanan; barang dan teknologi industri penerbangan dan luar angkasa; barang navigasi maritim; barang penggunaan ganda (untuk keperluan sipil dan militer); senjata api

¹ Sebelumnya telah dilaksanakan dua pertemuan darurat sebelum konflik benar-benar terjadi yakni pada tanggal 21 Februari 2022 pada saat Rusia mendukung kemerdekaan wilayah Donetsk dan Luhansk serta pada tanggal 23 Februari 2022 pada saat Rusia mengumumkan "special military operation" pada wilayah sebelah timur Ukraina (*Meeting Coverage Security Council, 2022*).

sipil, suku cadangnya dan bahan tentara lainnya; barang mewah; serta barang-barang lainnya yang dapat meningkatkan kapasitas industri Rusia (European Council, 2023). Tak hanya sampai disitu, Uni Eropa bahkan memberikan sanksi serupa terhadap Belarusia yang dipercaya terlibat membantu Rusia dalam invasinya terhadap Ukraina. Adapun sanksi tersebut antara lain sanksi individu dan ekonomi, perdagangan, larangan sistem SWIFT (*Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications*) untuk lima bank Belarusia, larangan transaksi dengan Bank Sentral Belarusia, pembatasan arus keuangan serta larangan penyediaan uang kertas berdenominasi Euro menuju Belarusia (European Council, 2023).

Negara-negara Pro-Rusia jelas memberikan respon yang berlawanan dengan mereka yang Pro-Ukraina. Bahkan Belarusia sendiri menjadi tempat persiapan serta jalur masuknya pasukan Rusia menuju Ukraina (Time, 2022). Hal itu sendiri terjadi sejak sebelum terjadinya invasi ketika Rusia dan Belarus melakukan latihan hingga Februari 2022. Bahkan latihan ini membuat Amerika Serikat mengawasi kedua negara tersebut karena khawatir akan menyerang Kyiv (Time, 2022). Belarusia telah menjadi tempat persiapan pasukan Rusia sebelum mulai menyerang Ukraina. Meskipun tindakan pemerintah Belarusia diprotes oleh masyarakatnya khususnya kelompok antiperang, pemerintah Belarusia tetap menjadikan negaranya sebagai tempat persiapan pasukan Rusia. Keadaan ini kemudian diperkuat oleh pemerintah Belarusia dengan melakukan amandemen pada konstitusinya untuk mengakhiri status bebas nuklir Belarusia (*The Washington Post*, 2022). Amandemen ini kemudian membuka jalan bagi Rusia untuk dapat meletakkan senjata nuklirnya di Belarusia.

Selain itu, Belarusia serta negara pro-Rusia lainnya yakni China dan Korea Utara meyakini

bahwa konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina tidaklah disebabkan oleh Rusia. China dan Korea Utara mengatakan sesungguhnya konflik yang terjadi antara Rusia-Ukraina disebabkan oleh Amerika Serikat (Kompas, 2022). Belarusia sendiri meyakini bahwa peristiwa konflik tersebut disebabkan tidak hanya oleh Amerika Serikat namun juga UK. Konflik Rusia-Ukraina dikatakan oleh ketiga negara tersebut diakibatkan oleh tindakan Amerika Serikat yang terlalu ikut campur dalam aktivitas Rusia dan Ukraina hingga membuat Rusia dan Ukraina dalam keadaan konflik (Kompas, 2022). Alasan yang sama juga diberikan oleh Belarusia ketika menyebut UK sebagai penyebab peristiwa konflik antara Rusia dan Ukraina.

Respon Imparsial Indonesia Pada Konflik Rusia-Ukraina Tahun 2022

Indonesia merespon konflik antara Rusia dan Ukraina tersebut dengan hati-hati. Indonesia tentunya tidak mendukung segala bentuk ancaman ataupun kekerasan terhadap integritas wilayah teritorial negara manapun. Namun Indonesia juga tidak secara serta-merta melayangkan hukuman kepada Rusia yang dianggap menjadi penyebab pecahnya konflik antara Rusia dan Ukraina. Justru Indonesia fokus untuk berusaha menemukan dan mendorong penyelesaian secara damai atas konflik tersebut. Hal itu sendiri terlihat dalam respon yang disampaikan Indonesia pada setiap kesempatan.

Kementerian Luar Negeri Indonesia memberikan *statement* yang menyatakan Indonesia tetap berpegang teguh pada prinsip dan tujuan PBB serta hukum internasional. Indonesia tidak mendukung segala bentuk penggunaan kekerasan terhadap suatu integritas wilayah dan kedaulatan negara. Indonesia juga mengajak setiap pihak untuk sama-sama menghormati tujuan dan prinsip yang telah tertuang dalam piagam PBB.

Tanggapan Indonesia dibuktikan pada *UN General Assembly Meeting*. Indonesia menjadi salah satu dari 141 negara yang memberikan dukungan terhadap resolusi untuk mengecam tindakan invasi Rusia terhadap Ukraina (UN News, 2022).

Namun, meskipun Indonesia mengecam dan prihatin atas tindakan Rusia terhadap Ukraina, Indonesia abstain dalam agenda pembekuan keanggotaan Rusia dari *UN Human Rights Council* sebagai hukuman atas tindakan Rusia terhadap Ukraina (BBC, 2022). Indonesia masih belum yakin bahwasanya Rusia sepenuhnya bersalah atas konflik Rusia-Ukraina. Maka dari itu, Indonesia perlu hati-hati dalam menentukan sikapnya.

Indonesia hingga saat ini tetap tidak memberikan sanksi terhadap Rusia. Indonesia menyatakan jika lebih memilih untuk mencari solusi damai melalui dialog dan diplomasi seperti yang disampaikan pada sidang yang dilaksanakan *UN General Assembly* (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2022). Indonesia juga mengajak agar setiap pihak dapat sama-sama menerapkan solusi serupa seperti yang dilakukan Indonesia. Pemberlakuan sanksi seperti sanksi dagang akan memicu terjadinya perang dagang antara Indonesia dengan pihak yang akan diberikan sanksi². Alih-alih memberikan sanksi, Indonesia fokus untuk memberikan bantuan terhadap para korban konflik Rusia-Ukraina.

Sejak 1 Desember 2021, Indonesia telah resmi ditunjuk sebagai *Presidensi Group of Twenty (G20) 2022*. Indonesia kemudian memanfaatkan kesempatan ini untuk mendorong penyelesaian damai atas konflik Rusia-Ukraina dengan melakukan kunjungan ke G7, Rusia dan Ukraina pada bulan Juni 2022.

Dalam kesempatan itu Indonesia menyampaikan untuk pentingnya upaya penyelesaian secara damai serta memberikan penekanan untuk tidak memadamkan semangat perdamaian. Selain itu, Indonesia juga mengatakan akan berupaya untuk memerikan bantuan seperti obat-obatan serta berkomitmen untuk rekonstruksi rumah sakit di sekitar Kyiv. Indonesia siap menjadi jembatan komunikasi antara Rusia dan Ukraina untuk mencari solusi damai atas konflik Rusia-Ukraina. Indonesia juga menekankan bahwa Indonesia tidak memiliki kepentingan apapun selain untuk menyelesaikan konflik dan menghindari dampak negatif akibat konflik (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2022).

Konflik antara Rusia dan Ukraina menyebabkan adanya krisis pasokan pangan global meningkat (DW, 2022). Rusia dan Ukraina merupakan pengekspor utama biji-bijian pokok khususnya gandum. Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh *United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)* gandum merupakan bahan pokok yang banyak dibutuhkan kedua terbesar (UNCTAD, 2023). Dilansir melalui website resmi *The Observatory of Economic Complexity (OEC)*, Rusia dan Ukraina menduduki posisi 5 besar pengekspor gandum dunia pada tahun 2021 (OEC World).

Konflik antara Rusia dan Ukraina dan serangkaian sanksi yang dijatuhkan oleh Pro-Ukraina pada Rusia mengakibatkan ekspor pangan global melambat (DW, 2022). Hal itu dikarenakan adanya penutupan jalur ekspor terutama di Laut Hitam dan Laut Azov akibat konflik Rusia-Ukraina serta sanksi perdagangan yang dijatuhkan menimbulkan munculnya perang dagang antara pihak-pihak yang terlibat sanksi. Melambatnya ekspor pangan global kemudian mengakibatkan angka kelaparan global meningkat. Pada akhir tahun 2020 penderita kelaparan akut yang tercatat oleh *World Food Programme* sebanyak kurang

² Perang dagang didefinisikan sebagai suatu kondisi ketegangan ekonomi yang biasanya berupa pemberlakuan kebijakan penarikan, pembatasan ekspor-impor ataupun hambatan perdagangan lainnya (*Bussines Dictionary*).

lebih 270 juta jiwa. Pada tahun 2021 jumlah tersebut meningkat menjadi kurang lebih 283 juta jiwa. Peningkatan drastis terjadi pada tahun 2022 yang memperlihatkan jumlah penderita kelaparan akut dunia melonjak hingga mencapai angka kurang lebih 349 juta jiwa. Keadaan ini juga menjadi alasan Indonesia untuk terus mengupayakan solusi yang lebih damai pada saat melakukan kunjungan pada KTT G7, Ukraina dan juga Rusia (DW, 2022).

Pada bulan Juni 2023, Indonesia kembali mengajak publik internasional untuk mengedepankan resolusi damai pada konflik Rusia-Ukraina. Dalam salah satu forum internasional yang diadakan oleh *The International Institute for Strategic Studies* di Singapura, Menteri Pertahanan Indonesia, H. Prabowo Subianto Djojohadikusumo membawa isu konflik Rusia-Ukraina dalam pidatonya. Pada kesempatan tersebut Prabowo menyebutkan bahwasanya apa yang terjadi di Eropa akan berefek pada Indo-Pasifik dan begitu juga sebaliknya. Hal itu sendiri dilihat dari terjadinya kenaikan harga energi dan pangan yang juga mengakibatkan banyak masyarakat diseluruh dunia menderita (*The International Institute for Strategic Studies*, 2023). Atas dasar itu kemudian Prabowo mengajak setiap perwakilan negara yang hadir pada forum tersebut untuk sama-sama berkontribusi dalam resolusi damai konflik Rusia-Ukraina.

Prabowo pada saat juga memberikan beberapa poin gambaran garis besar solusi damai yang mungkin saja bisa diterapkan jika seluruh pihak setuju (*The International Institute for Strategic Studies*, 2023). Pertama, Indonesia menawarkan untuk melakukan gencatan senjata pada wilayah titik konflik. Kedua, Indonesia juga menyarankan untuk membentuk zona demiliterisasi dengan menghimbau kedua pihak yang berkonflik untuk sama-sama mundur sejauh 15 km dari titik konflik. Ketiga, Indonesia meminta agar

PBB dapat mengawasi dan membentuk *observation force* pada wilayah zona demiliterisasi. Keempat, Indonesia juga menyarankan agar PBB dapat mengorganisir, melaksanakan dan mengeksekusi referendum pada zona demiliterisasi dan wilayah yang diperebutkan untuk dapat mengetahui harapan masyarakat secara objektif. Terakhir, Indonesia menyatakan bahwa Indonesia siap berkontribusi dalam memberikan bantuan *observation force* dibawah naungan *peacekeeping* PBB. Pada kesempatan itu juga, Indonesia menekankan bahwasanya sekarang bukan waktunya untuk mencari pihak mana yang bersalah dan pihak mana yang benar. Setiap pihak yang berkonflik satu sama lain akan memiliki pembenarannya masing-masing. Jadi Indonesia berusaha untuk mendorong penyelesaian damai agar dapat menghindari dampak negatif dan mencapai keamanan dunia.

Prudent Judgement Approach

Respon yang diberikan oleh Indonesia terhadap konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina sendiri sejalan dengan apa yang dijelaskan dalam konsep *prudent judgement approach*. Hal itu sendiri dapat dilihat dari bagaimana Indonesia memberikan respon yang tergolong hati-hati terhadap konflik Rusia-Ukraina tersebut untuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan dengan menghindari dampak negatif yang tidak diinginkan. Seperti apa yang dikatakan oleh Morgenthau (1967) bahwasanya kehati-hatian merupakan kebijakan terbaik yang dapat diterapkan dalam dunia politik.

Dalam konsep *prudent judgement approach* dijelaskan bahwa terdapat empat elemen penting yang harus diterapkan Indonesia untuk menentukan kebijakan yang tepat. Elemen pertama yakni penalaran reflektif. Berdasarkan elemen ini, kehati-hatian Indonesia muncul akibat adanya keadaan yang tidak pasti. Bagi Indonesia sendiri, meskipun konflik Rusia-

Ukraina tidak memberikan dampak secara langsung, namun konflik tersebut menjadi ancaman bagi setiap negara khususnya ancaman pangan. Bagaimana tidak, tingkat kelaparan akut pada tahun 2022 yang merupakan tahun awal meledaknya konflik antara Rusia dan Ukraina naik signifikan. Pada data yang telah disebutkan sebelumnya, sebanyak 349 juta masyarakat di seluruh dunia menderita kelaparan akut. Jumlah ini naik dratis dari tahun sebelumnya yakni 283 juta di tahun 2021 dan 270 juta di tahun 2020. Jumlah penderita yang melonjak dratis di tahun 2022 ini dikatakan oleh PBB melalui Sekretaris Jendral Antonio Guterres dikarenakan konflik Rusia-Ukraina memperparah kondisi krisis pangan yang belum sepenuhnya pulih dari gangguan iklim dan pandemi COVID-19 (UN News, 2022).

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Rusia dan Ukraina merupakan dua dari lima negara eksportir gandum terbesar dunia (OEC, 2020). Konflik tersebut mengakibatkan rute pengiriman gandum utama Rusia dan Ukraina yakni Laut Hitam dan Laut Azov terhalang. Adanya sanksi perdagangan pada Rusia sebagai eksportir gandum terbesar dunia juga mengakibatkan potensi terjadinya perang dagang meningkat. Sanksi yang dijatuhkan terhadap Rusia mengakibatkan Rusia memutuskan hubungan dengan negara-negara yang dianggap tidak bersahabat atau dengan kata lain mereka yang menjatuhkan sanksi terhadap Rusia. Rusia bahkan memutuskan hubungan dengan negara-negara yang enggan melakukan transaksi dengan mata uang rubel. Hal itu merupakan wujud dari ungkapan Kementerian Luar Negeri Rusia yang mengatakan akan melakukan balasan terhadap negara-negara yang menjatuhkan sanksi pada Rusia (Reuters, 2022). Rusia mengatakan akan menargetkan balasan pada komoditas dan aset yang sensitif bagi mereka dimana sektor pertanian menjadi

salah satunya. Kondisi ini yang kemudian menandakan besarnya potensi meningkatnya perang dagang.

Akibat dari kondisi tersebut produksi salah satu bahan pangan utama yakni gandum terhambat selama terjadinya konflik. Gandum sendiri merupakan biji-bijian paling banyak di produksi kedua di dunia berdasarkan data dari *The United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD, 2023) Produksi gandum yang terhambat berkontribusi dalam menambah jumlah angka kelaparan global di tahun 2022. Berdasarkan data yang diterbitkan dalam situs *The Observatory of Economic Complexity*, Indonesia sendiri merupakan pengimpor gandum Ukraina terbesar ketiga dunia pada tahun 2021. Sebanyak 2.98 US Dollar gandum di impor Indonesia pada tahun tersebut.

Untuk Itu, Indonesia berupaya merespon konflik tersebut dengan hati-hati sebagai harapan agar konflik tersebut tidak berekskalasi dan jika memungkinkan Indonesia berharap konflik tersebut dapat diselesaikan. Setelah melakukan penalaran secara reflektif, kemudian Indonesia harus berupaya menghindari kemungkinan dari keadaan yang tidak pasti tersebut. Dengan membawa harapan bahwa konflik tidak berekskalasi dan konflik dapat diselesaikan, Indonesia pada tiap kesempatan selalu menyematkan usulan yang dijelaskan dalam elemen moderasi pada konsep *prudent judgement approach* yakni seruan penyelesaian melalui dialog dan diplomasi. Sebagai upaya aktif Indonesia, Indonesia juga melalui Menteri Pertahanannya mengusulkan rancangan penyelesaian konflik. Indonesia mengatakan bahwa rancangan tersebut merupakan cerminan dari mekanisme-mekanisme damai yang telah berhasil diterapkan dan patut dicoba dalam kasus Rusia dan Ukraina.

Klaim Indonesia sendiri didasari atas pengalaman Indonesia yang pernah dijajah selama ratusan tahun lamanya (*The International Institute for Strategic Studies*, 2023). Indonesia sendiri paham bahwa korban sesungguhnya adalah masyarakat sipil. Hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan direnggut begitu saja akibat dari peristiwa konflik tersebut. Indonesia yakin bahwasanya rancangan penyelesaian konflik tersebut patut diperhitungkan adalah karena rancangan tersebut berhasil diterapkan di Korea dan Vietnam. Selain itu, untuk menegaskan pentingnya rancangan tersebut, Indonesia sendiri mengatakan bahwa untuk dapat menghindari dampak negatif yang lebih parah jika konflik tersebut berlanjut, maka penyelesaian damai lebih diperlukan daripada hanya mencari pihak yang bersalah (*The International Institute for Strategic Studies*, 2023).

Lebih lanjutnya Indonesia juga menerangkan bahwa kawasan Eropa bukanlah satu-satunya kawasan yang dilanda konflik. Di kawasan Asia, konflik lebih sering terjadi bahkan lebih parah dari pada yang terjadi di Eropa (*The International Institute for Strategic Studies*, 2023). Berdasarkan elemen pengalaman yang dijelaskan dalam *prudent judgement approach*, Indonesia sendiri sering kali dihadapkan dengan konflik yang terjadi di kawasan khususnya di kawasan Asia Tenggara. Dengan dihadapkan dengan konflik-konflik di kawasan Indonesia selalu memberikan respon secara Imparsial bahkan sejak terjadinya Perang Dingin.

Hal tersebut dibuktikan oleh sejarah dimana Indonesia merupakan salah satu negara pencetus Gerakan Non Blok (GNB) yang lahir pada tahun 1955. Gerakan ini merupakan gerakan yang mengarahkan setiap negara yang terlibat dalam gerakan untuk membentuk posisi sendiri secara independen dengan

merefleksikan kepentingan negaranya (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2022). Gerakan ini kemudian berhasil membuat Indonesia terhindar dari dampak langsung dalam Perang Dingin. Sejak saat itulah Indonesia kemudian sering kali memberikan respon imparsial yakni non blok atau strategi *hedging* terhadap konflik yang sedang terjadi dari pada memihak salah satu pihak sebagai elemen identifikasi pilihan yang disebutkan dalam konsep *prudent judgement approach*.

Hedging Strategy

Berdasarkan pendekatan secara *prudent judgement*, kehati-hatian dalam mengambil keputusan dengan bersikap imparsial merupakan strategi yang paling bijak yang dapat dilakukan Indonesia. Strategi ini merupakan *hedging strategy* versi Indonesia yang dituangkan Indonesia pada kebijakan luar negerinya dengan menerapkan prinsip bebas-aktif. Prinsip bebas-aktif sendiri bersumber dari Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 sebagai salah satu landasan politik Indonesia khususnya pada bagian pembukaannya (Haryanto, 2014). Pada bagian pembukaan UUD 1945 terdapat kalimat yang menyatakan bahwa kemerdekaan merupakan hak yang dimiliki oleh seluruh bangsa dan negara di dunia. Selain itu juga dijelaskan bahwa penjajahan yang menjadi tindakan merebut hak yang dimiliki negara lain harus dihapuskan. Indonesia dalam paragraf terakhir pembukaan UUD tersebut memiliki misi untuk ikut menjaga ketertiban dunia atas dasar kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial.

Bebas dalam prinsip bebas-aktif Indonesia diartikan bahwa Indonesia berhak menentukan sikapnya atas permasalahan-permasalahan yang terjadi secara bebas tanpa memihak ataupun dipengaruhi oleh pihak atau blok manapun yang pada dasarnya tidak

mencerminkan kepribadian negara Indonesia (Haryanto, 2014). Sedangkan aktif dalam prinsip bebas-aktif Indonesia berarti Indonesia secara aktif berjuang untuk menghapus penjajahan serta menciptakan dan menjaga ketertiban dunia (Haryanto, 2014). Prinsip bebas-aktif inilah yang menjadi dasar penerapan kebijakan luar negeri Indonesia pada kancah Internasional yang juga disesuaikan dengan kondisi dari sistem internasional.

Sejatinya ada lebih dari sekedar upaya untuk menjaga perdamaian yang menjadi implementasi dari prinsip aktif Indonesia. Dalam konsep *hedging strategy*, Indonesia dijelaskan sebagai negara yang berupaya menghindari ambiguitas ancaman yang terjadi akibat dari adanya konflik antara Rusia dan Ukraina. Artinya menjaga perdamaian hanya sebatas *cover* dari makna prinsip aktif Indonesia. Jika melihat kembali respon Indonesia, Indonesia cenderung memosisikan dirinya imparial atau tidak memihak Rusia ataupun Ukraina. Hal ini jelas terlihat pada UN General Assembly Meeting. Indonesia mendukung 3 resolusi yang secara umum mengutuk langkah Rusia untuk menginvasi Ukraina (UN News). Namun Indonesia abstain pada resolusi yang berupaya menghukum Rusia dengan menangguk Rusia dari *UN Human Right Council*. Padahal, dengan mendukung resolusi untuk mengutuk langkah Rusia, Indonesia telah setuju menyatakan bahwasannya Rusia bersalah dalam konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina yang menyebabkan banyak masyarakat kehilangan haknya. Namun Indonesia tetap tidak dapat menentukan pilihannya untuk mendukung atau tidak dalam resolusi untuk menangguk Rusia dalam *UN Human Right Council*. Indonesia berdalih bahwa menangguk Rusia akan menciptakan kredibilitas yang negatif pada PBB (BBC, 2022). Indonesia juga mendorong PBB untuk mencari

data yang akurat terkait penyebab konflik tersebut sebelum melakukan pencabutan hak sahnya anggotanya.

Kemudian ketika melihat salah satu hal yang dituntut oleh Rusia pada saat melakukan negosiasi dengan Ukraina, Rusia menuntut agar Ukraina menjadi netral dan melarang Ukraina untuk bergabung dengan *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) (CNN Indonesia, 2022). aktivitas NATO yang ingin melakukan ekspansi keanggotaannya ke wilayah Eropa Timur (Hidriyah, 2021), serta adanya percobaan Ukraina yang meminta untuk bergabung dengan NATO menghadirkan dilemma keamanan bagi Rusia. Dilema keamanan ini sendiri terjadi akibat peningkatan hubungan antara kedua pihak (Sukma Dewi, et al., 2017). Hal itu sendiri dipandang Rusia sebagai ancaman terhadap kepentingannya (Ramadhan, N., et al., 2017).

Jadi, dapat dikatakan invasi yang dilakukan Rusia ini merupakan strateginya untuk melakukan strategi *balancing* dalam konsep *balance of power*. Artinya konflik ini bukanlah antara Rusia dan Ukraina semata, namun juga dengan NATO. Pernyataan ini juga diperkuat dari adanya paket sanksi yang diberikan oleh negara-negara yang tergabung dalam NATO seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Kondisi ini telah memperkeruh ketegangan yang terjadi antara Rusia dan NATO. Indonesia sebagai negara yang dihadapi dengan ketidakpastian akibat dari ketegangan antara dua kekuatan besar yakni antara Rusia dan Ukraina serta NATO seperti adanya ancaman pangan yang menimbulkan peningkatan kasus kelaparan akut yang disebabkan oleh ketegangan tersebut. Lebih dari pada itu ada ancaman potensi perang dagang yang akan didapatkan Indonesia ketika Indonesia memilih salah satu pihak. Maka dari itu Indonesia memilih mengambil posisi imparial dengan tidak memihak antara kedua kekuatan tersebut seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Dalam konsep *hedging*, kondisi ini merupakan kondisi dimana Indonesia harus menganalisa dampak baik positif maupun negatif yang akan didapatkan Indonesia ketika Indonesia harus memilih salah satu pihak. Namun kenyataannya Indonesia memilih untuk bersikap imparial dan tidak memihak pihak manapun. Artinya Indonesia berada dalam kondisi tidak dapat memilih antara *balancing* atau *bandwagoning*.

Hal ini sebagai upaya Indonesia untuk menghindari potensi ancaman langsung yang ditimbulkan dari ketegangan dua kekuatan tersebut. Adapun ketika Indonesia hanya memihak salah satu pihak seperti Rusia atau Ukraina yang didukung oleh NATO maka akan ada ancaman berkurangnya pasokan pangan Indonesia khususnya gandum. Hal tersebut sendiri dilihat dari 5 negara pengekspor gandum terbesar di dunia yakni peringkat pertama adalah Rusia, peringkat kedua adalah Amerika Serikat yang merupakan anggota NATO, peringkat ketiga merupakan Australia, keempat adalah Kanada yang juga merupakan anggota NATO dan posisi kelima adalah Ukraina. Belum lagi dengan adanya potensi perang dagang yang terjadi jika Indonesia ikut secara aktif merespon konflik tersebut dengan menerapkan sanksi pada Rusia seperti halnya negara pro-Ukraina.

Aksi saling balas sanksi antara Rusia dan pro-Ukraina menyebabkan adanya pemutusan hubungan satu sama lain. Indonesia sendiri memiliki hubungan yang sangat baik terhadap pihak-pihak yang sedang berkonflik. Hubungan ini sendiri salah satunya terlihat dalam forum kerja sama G20 yang merupakan forum internasional yang berfokus pada pembahasan bidang ekonomi dan pembangunan dimana Rusia, G7 dan Uni Eropa juga menjadi anggota di dalamnya. Konflik antara Rusia dan Ukraina mempengaruhi hubungan yang terjadi di dalam G20. Hal itu sendiri terlihat pada saat

Indonesia menjadi Presidensi G20. Sebagian besar negara-negara G20 mendesak Indonesia untuk tidak mengundang Rusia dalam perhelatan kali ini, bahkan AS menyebut bahwa Rusia sudah sepatutnya dikeluarkan dari G20 seperti Rusia yang dikeluarkan dari kerjasama internasional yang saat ini disebut G7 akibat dari *proxy war* pada tahun 2014.(CNN, 2022). Namun Indonesia enggan terburu-buru menyetujui desakan tersebut dan masih tetap ingin menjalin kerjasama lebih lanjut bersama Rusia. Indonesia tetap bersikap imparial dan tetap mengundang Rusia untuk hadir dalam perhelatan G20 pada tahun 2022. Sebagai gantinya Indonesia juga mengundang Ukraina sebagai tuntutan negara-negara pro-Ukraina yang tergabung dalam forum G20. Kondisi ini menjelaskan sikap pasif atau prinsip bebas yang diperlihatkan Indonesia ketika Indonesia dihadapkan pada keadaan dimana Indonesia diharuskan untuk memilih salah satu pihak.

Adapun strategi aktif Indonesia terlihat pada saat Indonesia mencoba memberikan rancangan resolusi atas konflik Rusia-Ukraina pada saat forum internasional yang diadakan oleh *The International Institute for Strategic Studies*. Resolusi tersebut kemudian memunculkan respon kontra khususnya diperlihatkan oleh negara pro-Ukraina seperti Jerman yang juga merupakan anggota NATO. Jerman mempertanyakan Indonesia mengenai istilah konflik Rusia-Ukraina yang kurang tepat. Jerman menekankan bahwasanya istilah yang pantas ialah invasi Rusia atas Ukraina mengingat Rusia sebagai pelaku tunggal dalam peristiwa tersebut (*The International Institute for Strategic Studies*, 2023). Melanjutkan pernyataannya Jerman juga mempertanyakan rancangan resolusi yang diberikan Indonesia dengan mengatakan bahwasanya Ukraina akan benar-benar hilang jika Ukraina berhenti membela diri seperti apa yang ditawarkan Indonesia yakni gencatan senjata. Rancangan ini juga ditolak oleh Ukraina. Ukraina

mengatakan bahwasanya tidak membutuhkan mediator yang membawa rencana aneh. Sebaliknya, Rusia justru mengapresiasi langkah Indonesia yang berupaya mengatasi krisis di Ukraina.

Menanggapi hal tersebut, guna memperkuat posisi imparisial Indonesia, Indonesia harus tetap bersikap pasif. Hal itu sendiri kemudian dilakukan Indonesia dengan mengatakan bahwasanya bukan waktunya untuk mencari pihak mana yang bersalah dan pihak mana yang benar. Jadi Indonesia berusaha untuk mendorong penyelesaian damai agar dapat menghindari dampak negatif dan mencapai keamanan dunia. Hal itu juga didukung dengan contoh historis karena resolusi yang ditawarkan Indonesia berhasil diterapkan di Korea dan Vietnam. Contoh historis ini kemudian menjadi penekanan bahwa Indonesia hanya berupaya menyelesaikan konflik dengan mengesampingkan siapa pihak yang bersalah dalam konflik tersebut. Kondisi ini membuka lebar kesempatan Indonesia jika Indonesia nantinya harus memilih untuk bemanuver menuju salah satu pihak untuk dapat mengambil keuntungan lebih ataupun sekedar menghindari kerugian seperti apa yang ditawarkan oleh konsep hedging strategi.

PENUTUP

Jika mengacu pada konsep prudent judgement approach, respon hati-hati Indonesia merupakan strateginya dalam menghadapi kondisi yang tidak pasti. Ketidakpastian kondisi bagi Indonesia sendiri dijelaskan pada saat kunjungannya sebagai Presiden G20 serta pada saat menghadiri forum internasional yakni adanya ancaman ketahanan pangan yang mengakibatkan meningkatnya kasus kelaparan akut global. Rusia dan Ukraina sendiri merupakan lima pengekspor terbesar makanan pokok yakni gandum dan Indonesia merupakan pengimpor gandum terbesar ketiga di dunia. Adanya kondisi tersebut

mengharuskan Indonesia hati-hati dalam memberikan respon untuk dapat mencari strategi yang tepat. Setelah kemudian Indonesia melakukan analisis berdasarkan empat elemen prudent judgement approach yakni penalaran reflektif, kebijakan moderasi, pengalaman dan identifikasi pilihan, strategi yang diadopsi Indonesia ini mengarah pada konsep *hedging strategy* versi Indonesia yakni bersikap imparisial dengan memperlihatkan respon bebasnya tanpa dipengaruhi pihak manapun namun mengupayakan strategi yang aktif. Ini dilakukan Indonesia selain untuk dapat mencapai ketertiban dunia sebagai tujuan Indonesia, juga sembari menjaga hubungan Indonesia dengan pihak-pihak yang terlibat konflik untuk menghindari dampak negatif dari konflik tersebut sembari memperluas kesempatan Indonesia bermanuver ketika diperlukan nantinya.

Daftar Pustaka

Buku

- Bull, H. (2002). *The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics* (3rd edition). New York: Columbia University Press.
- Bull, H. and Watson, A. (1984). *The Expansion of International Society*. Oxford: Clarendon Press.
- Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. (1996). *Sejarah Diplomasi Republik Indonesia dari Masa ke Masa* (edisi ketiga). Jakarta: Departemen Luar Negeri Republik Indonesia.
- Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. (1998). *Sejarah Diplomasi Republik Indonesia dari Masa ke Masa* (edisi keempat). Jakarta: Departemen Luar Negeri Republik Indonesia.
- Morgenthau, Hans J. (1967). *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace* 4th Editions. New York: Alfred A. Knopf.

Jurnal

- Arena, M. do C. P. (2017). Changing foreign policy: the Obama Administration's decision to oust Mubarak. *Revista Brasileira de Política Internacional*, 60 (1).
- Boutros-Ghali dalam Cayetha, G. A., et. al. (2021). Mengukur Efektivitas Preventive Diplomacy Indonesia Di ASEAN dalam Menanggapi Konflik

- Kudeta Militer Myanmar 2021. *Jurnal Sentris Edisi Khusus Diplomasi*.
- Butun, G., Yani, Y. M., & Bainus, A. (2021). Indonesian Foreign Policy Maintaining In Maritime Security Towards China's New Silk Road. *Global Political Studies Journal*, 5 (2).
- Cayetha, G. A., et. al. (2021). Mengukur Efektivitas Preventive Diplomacy Indonesia Di ASEAN dalam Menanggapi Konflik Kudeta Militer Myanmar 2021. *Jurnal Sentris Edisi Khusus Diplomasi*.
- Dunne, T. (1995). International Society: Theoretical Promises Fulfilled?. *Cooperation and Conflict* 30(2).
- Goh, E. (2005). Meeting the China Challenge: The U.S. in Southeast Asian Regional Security Strategies. *Policy Studies*, 16.
- Haryanto, Agus. (2014). Prinsip Bebas Aktif dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Perspektif Teori Peran. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, 4(2)
- Hasymi, A. M. (2020). ASSESSING INDONESIA MARITIME DOCTRINE FOREIGN POLICY AS A RESPONSE TOWARD STRATEGIC RIVALRY IN SOUTHEAST ASIA. *Journal of Islamic and International Affairs*, 5(2).
- Hidriyah, Sita. 2022. Eskalasi Ketegangan Rusia-Ukraina. *Jurnal Hubungan Internasional*, 14(4).
- Jehn, K. A., & Bendersky, C. (2003). Intragroup Conflict in Organizations: A Contingency Perspective on the Conflict- Outcome Relationship. *Research in Organizational Behavior*, 25.
- Kuik, Cheng-Chwee. (2008). The Essence of Hedging: Malaysia and Singapore's Response to a Rising China. *Contemporary Southeast Asia*, 30 (2).
- Kumar, Manali. 2022. Making Decisions Under Uncertainty: The Prudent Judgement Approach. *European Journal of International Security*, 8 (1).
- Ma'aruf, F., Legionosuko, T., & Risman, H. (2020). The Rationality of Indonesia Free-Active Politics Facing Chinese Aggressiveness in the Claims of the North Natuna Sea. *Technium Social Sciences Journal*, 8.
- Manan, M. (2017). Foreign Policy and National Interest: Realism and Its Critiques. *Global & Strategis*. 9 (2).
- Muhamad, S.V., Nainggolan, P.P. (2018). Konfrontasi Rusia-Ukraina. *Jurnal Hubungan Internasional*, 10 (24).
- Ningtyas Kusuma, N., Kumala Dewi, P., & Kawitri Resen, P. (2018). RESPON RUSIA TERHADAP SANKSI EKONOMI UNI EROPA TAHUN 2014-2015. *DIKSHI (DISKUSI ILMIAH KOMUNITAS HUBUNGAN INTERNASIONAL)*, 1(2). Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/view/42808>.
- Ramadhan, N., Putri, P., & Resen, P. (2023). ANALYSIS OF RUSSIAN HYBRID WAR AGAINST UKRAINE IN CRIMEA IN 2014. *DIKSHI (DISKUSI ILMIAH KOMUNITAS HUBUNGAN INTERNASIONAL)*, 3(1), 83-96. Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/view/89099>.
- Somantri, G. R. (2005). Memahami Metode Kualitatif. *Jurnal Makara, Sosial Humaniora*. 9 (2).
- Sukma Dewi, N., Fasisaka, I., & Nugraha, A. (2017). FAKTOR – FAKTOR YANG MENDORONG PAKISTAN UNTUK MELAKUKAN KERJASAMA MILITER DENGAN RUSIA PADA TAHUN 2010 – 2014. *DIKSHI (DISKUSI ILMIAH KOMUNITAS HUBUNGAN INTERNASIONAL)*, 1(1). Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/view/31467>.

Website Pemerintah

- European Council. (2023). EU Sanctions Against Russia Explained. Diambil kembali dari [consilium.europa.eu](https://www.consilium.europa.eu): <https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/restrictive-measures-against-russia-over-ukraine/sanctions-against-russia-explained/#sanctions> pada 9 Agustus 2023.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2022). Dorong Perdamaian, Indonesia Hadiri KTT G7 di Jerman serta Kunjungi Presiden Ukraina dan Presiden Rusia. Diambil kembali dari kemlu.go.id: <https://kemlu.go.id/portal/id/read/3732/berita/dorong-perdamaian-indonesia-hadiri-ktt-g7-di-jerman-serta-kunjungi-presiden-ukraina-dan-presiden-rusia> pada 5 April 2023.
- OHCHR. (2023). Ukraine: Civilian Casualty Update 8 May 2023. Diambil kembali dari [ohchr.org](https://www.ohchr.org):

<https://www.ohchr.org/en/news/2023/05/ukraine-civilian-casualty-update-8-may-2023> pada 10 Mei 2023.

UNCHR. (2023). Ukraine Refugee Situation. Diambil kembali dari [data.unhcr.org: https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine/location](https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine/location) pada 5 April 2023.

UNCTAD. (2023). A Trade Hope: The Impact of The Black Sea Grain Initiative. Diambil kembali dari [unctad.org: https://unctad.org/publication/trade-hope-impact-black-sea-grain-initiative](https://unctad.org/publication/trade-hope-impact-black-sea-grain-initiative) pada 9 Agustus 2023.

UN News. (2022). General Assembly Holds Emergency Special Session on Ukraine. Diambil kembali dari [news.un.org: https://news.un.org/en/story/2022/02/1112912](https://news.un.org/en/story/2022/02/1112912) pada 19 Mei 2023.

World Food Programme. (2021). Annual Review 2020. Diambil kembali dari [wfp.org: https://www.wfp.org/publications/annual-review-2020](https://www.wfp.org/publications/annual-review-2020) pada 7 Juli 2023.

World Food Programme. (2022). Annual Review 2021. Diambil kembali dari [wfp.org: https://www.wfp.org/publications/wfp-annual-review-2021](https://www.wfp.org/publications/wfp-annual-review-2021) pada 7 Juli 2023.

World Food Programme. (2023). Annual Review 2022. Diambil kembali dari [wfp.org: https://www.wfp.org/publications/wfp-annual-review-2022](https://www.wfp.org/publications/wfp-annual-review-2022) pada 7 Juli 2023.

Portal Berita

ACAPS. (2019). *Ukraine: Conflict in Donetsk and Luhansk*. Diambil kembali dari [acaps.org: https://www.acaps.org/sites/acaps/files/products/files/20191104_acaps_briefing_note_ukraine_conflict_in_donetsk_and_luhansk.pdf](https://www.acaps.org/sites/acaps/files/products/files/20191104_acaps_briefing_note_ukraine_conflict_in_donetsk_and_luhansk.pdf) pada 5 Januari 2023.

Al Jazeera. (2022). Infographic: Russia, Ukraine and The Global Wheat Supply. Diambil kembali dari [aljazeera.com: https://www.aljazeera.com/news/2022/2/17/infographic-russia-ukraine-and-the-global-wheat-supply-interactive](https://www.aljazeera.com/news/2022/2/17/infographic-russia-ukraine-and-the-global-wheat-supply-interactive) pada 9 Agustus 2023.

Al Jazeera. (2023). Where does Your Country Stand on The Russia-Ukraine War?. Diambil kembali dari [aljazeera.com: https://www.aljazeera.com/news/2023/2/16/mapping-where-every-country-stands-on-the-russia-ukraine-war](https://www.aljazeera.com/news/2023/2/16/mapping-where-every-country-stands-on-the-russia-ukraine-war) pada 19 Mei 2023

CNN Indonesia. (2022). *4 Tuntutan Rusia ke Ukraina, 2 Poin Sulit Dipenuhi Zelensky*. Diambil kembali dari [cnnindonesia.com: https://www.cnnindonesia.com/internasional/2023/08/09/134-773048/4-tuntutan-rusia-ke-ukraina-2-poin-sulit-dipenuhi-zelensky](https://www.cnnindonesia.com/internasional/2023/08/09/134-773048/4-tuntutan-rusia-ke-ukraina-2-poin-sulit-dipenuhi-zelensky) pada 9 Agustus 2023.

OECD World. (n.d.) Wheat and Meslin. Diambil kembali dari [oec.world: https://oec.world/en/profile/hs/wheat](https://oec.world/en/profile/hs/wheat) pada 9 Agustus 2023

Lain-Lain

Cambridge Dictionary, (n.d.). Proxy War. Diambil kembali dari [dictionary.cambridge.org: https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/proxy-war](https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/proxy-war)